

**THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN SOE
FINANCIAL MANAGEMENT ON THE WELFARE OF THE
COMMUNITY OF DHARMASRAYA**

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN BUMNag TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DHARMASRAYA**

Sidratul Fadil¹⁾

Mukhzarudfa²⁾

Reni Yustien³⁾

¹⁾ *Alumni Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia*

^{2&3)} *Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia*

E-mail: Sidratulfadil29698@gmail.com¹⁾, mukhzarudfa@unja.ac.id²⁾, reni.yustien@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Accountability and Transparency in BUMNag Financial Management on the welfare of the Dharmasraya community. The population in this study is the entire community of Nagari Koto Padang, totaling 6,040 people, and the sampling technique used is purposive sampling by looking at the status of the community in Nagari Koto Padang totaling 98 people. This research is a descriptive statistical research, using multiple regression analysis using SPSS version 25 software.

The test results are that accountability and transparency in the financial management of BUMNag have a significant positive effect on the welfare of the Nagari community. This is because the management of BUMNag is used for development activities and community empowerment related to the welfare of the community itself.

Keywords: Influence, Accountability, Transparency, Welfare, Dharmasraya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan BUMNag terhadap kesejahteraan masyarakat Dharmasraya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Nagari Koto Padang yang berjumlah 6.040 jiwa, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan melihat kepada status masyarakat di Nagari Koto Padang berjumlah 98 orang. Penelitian ini merupakan penelitian statistik deskriptif, dengan menggunakan analisis regresi berganda menggunakan software SPSS versi 25.

Hasil pengujian yaitu bahwa akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMNag berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari. Hal ini dikarenakan pengelolaan BUMNag digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kata kunci: Pengaruh, Akuntabilitas, Transparansi, Kesejahteraan, Dharmasraya

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan subsistem yang terkecil dan terendah dalam struktur pemerintahan Negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan (Ni'matul, 2015:36). Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang ditetapkan oleh Undang-Undang (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Untuk itu, desa termasuk kedalam wilayah kecil dan memiliki susunan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1, Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Undang-Undang tentang Desa ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Desa atau sebutan dengan nama lain seperti Nagari di Sumatera Barat. Untuk mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat maka dibentuk suatu bentuk kelembagaan yang mana bentuk kelembagaan ini berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau disebut juga dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi Desa atau yang selanjutnya disebut Nagari, berdasarkan kebutuhan dan potensi Nagari. BUMNag diharapkan dapat menjadi pilar kesejahteraan bangsa, karena BUMNag tidak lain merupakan usaha didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat Desa/Nagari, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat (Mesta dkk, 2018).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan Daerah dan pertanggungjawaban keuangan tersebut, pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai good governance (Mardiasmo, 2006). Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Nagari digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari, dengan prinsip yaitu Transparan, Akuntabel dan Partisipatif.

Keberadaan BUMNag di Nagari Koto Padang, belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Nagari pasal 19 ayat 4 sehingga kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMNag terhadap masyarakat, kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMNag terhadap masyarakat, pengaruh

keberadaan BUMNag belum terlaksana sesuai dengan tujuan dan fungsi yang diharapkan untuk meningkatkan pembangunan Nagari serta kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Definisi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. Sedangkan menurut Sujarweni (2015), akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2. Prinsip dan Dimensi Akuntabilitas

LAN dan BPKP (2000), mengkalisifikasi Prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Mahmudi (2013), menyatakan terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)
2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*).
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*).
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).
5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*).

2.3. Definisi Transparansi

Adrianto (2007), berdasarkan perspektifnya transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

2.4. Prinsip-Prinsip Tranparansi

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa prinsip-prinsip transparansi keuangan adalah sebagai berikut:

1. *Invormativeness* (Informatif)

Informatif artinya pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Berikut ini indikator dari informatif diantaranya yaitu:

- a. Tepat Waktu
- b. Memadai
- c. Jelas
- d. Akurat
- e. Dapat diperbandingkan
- f. Mudah diakses

2. Disclosure (Pengungkapan)

Pengungkapan pada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial. Berikut indikator dari pengungkapan diantaranya yaitu:

- a. Kondisi Keuangan
- b. Susunan Pengurus

2.5. Defenisi Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, dan makmur dan dapat berarti selamat dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Dengan kata lain sejahtera adalah “Keadaan dimana seseorang berada dalam kondisi yang aman, makmur, sentosa, serta selalu berada dalam keselamatan dan ketentraman serta bebas dari gangguan” (Mulyawan, 2016).

2.6. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan menurut Soetomo (2014) mengandung tiga komponen yaitu:

1. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin
2. Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran
3. Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

2.7. Nagari (Desa)

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa ”Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.8. Defenisi BUMNag

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Nagari pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Nagari, yang selanjutnya

disebut BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari”.

2.9. Pendirian BUMNag Dan Tujuan Pendirian BUMNag

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Nagari. Pendirian BUMNag dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 sampai 4 bahwa

1. Nagari dapat mendirikan BUMNag;
2. Pendirian BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
3. Pendirian BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjalankan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari untuk kemakmuran masyarakat Nagari.
4. Pendirian BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. inisiatif Nagari; b.potensi usaha ekonomi Nagari; c. sumber daya alam di Nagari; d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMNag; e. keberadaan usaha ekonomi yang dikelola oleh masyarakat; f. hasil identifikasi dan inventarisasi aset Nagari; dan g. aspek sosial budaya”.

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2018 Tujuan pendirian BUMNag dijelaskan pada pasal 5 butir a sampai butir h yaitu: a. mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Nagari; b. mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari; c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari; d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari dan atau dengan pihak ketiga; e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f. membuka lapangan kerja; g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari; dan h. meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Model Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Statistik deskriptif adalah yang digunakan untuk menggambarkan data dengan cara mendeskripsikan data atau menggambarkan yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (Ghozali, 2016). Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian konklusif yang memiliki tujuan utama untuk mendeskripsikan sesuatu biasanya penjelasan mengenai karakteristik pasar atau fungsi

(Sekaran, 2006).

3.2. Hipotesis

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu:

- H1: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMNag berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Koto Padang.
- H2: Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMNag berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Koto Padang.

3.3. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMNag Sakato Mandiri terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Menurut Sekaran (2006) data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti pada variabel minat untuk tujuan khusus penelitian. Data primer pada penelitian ini di dapat melalui pengisian kuesioner oleh masyarakat, serta observasi langsung untuk mendapatkan data pendukung permasalahan di Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner atau angket dan dokumentasi.

3.6. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat di Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang jumlah masyarakatnya 6040 jiwa terdiri dari 3154 laki-laki dan 2886 perempuan (Data penduduk tahun 2019 Nagari Koto Padang).

Sampel penelitian ini adalah Wali Nagari 1 orang, Kepala Jorong 13 orang, Perangkat Nagari 12 orang, Ketua Lembaga Adat 7 orang, Perangkat BUMNag 9 orang, Tokoh Masyarakat 20 orang, dan Organisasi Masyarakat 36 orang sehingga total sampel adalah 98 orang.

3.7. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel terikat yaitu kesejahteraan masyarakat. Adapun indikator kesejahteraan masyarakat yaitu:

1. Keadilan Sosial: Dapat dilihat dari pengelolaan Keuangan BUMNag untuk fasilitas pelayanan publik.
2. Keadilan Ekonomi: Dapat dilihat dari adanya peningkatan ekonomi masyarakat Desa. Dan mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru.

3. Keadilan Demokrasi: Dapat dilihat dari kemudahan akses informasi perencanaan, pengelolaan Keuangan BUMNag.

3.8. Variabel Independen

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan BUMNag. Adapun indikator yang dimaksud yaitu:

1. Transparan: Dapat dilihat dari keterbukaan informasi mengenai pengelolaan Kuangan BUMNag dan juga melalui adanya musyawarah Nagari.
2. Akuntabel: Dapat dilihat dari adanya pengawasan tentang pelaksanaan BUMNag dan juga adanya laporan pertanggung jawaban pengelolaan dan pemberdayaan BUMNag Sakato Mandiri.

3.9. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas adalah *korelasi product moment*.

3.10. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Teknik pengukuran reliabilitas instrument dalam penelitian ini menggunakan rumus alfa.

3.11. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Uji normalitas digunakan untuk menunjukkan apakah dalam model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal, dikarenakan dalam uji t mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menunjukkan apakah varians pengamatan bersifat homoskedastisitas. Sedangkan uji linearitas digunakan untuk melihat apakah model linear sudah benar atau tidak (Ghozali, 2016).

3.12. Uji Hipotesis

3.12.1. Uji Parsial

Uji parsial (uji t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas (*independen*) secara individual dalam menerangkan variasi variabel (*dependen*). Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dan melakukan perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016).

3.12.2. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini perhitungan (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016).

Penelitian terdahulu menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted (R^2), hal ini dikarenakan kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka (R^2) pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.12.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan BUMNag terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa digunakan metode analisis regresi linier berganda.

3.12.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bermaksud bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah independen variabelnya minimal dua (Sugiyono, 2014:277).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Responden

Responden memiliki respon yang berbeda-beda dalam menjawab instrument penelitian. Oleh karena itu, diperlukan klasifikasi responden untuk mengetahui identitas responden sebagai penunjang data seperti jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 98 orang.

1. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin

Responden yang terpilih dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 55 orang atau 56,1 % dari total sampel, dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 43 orang atau 43,9 %.

2. Karakteristik berdasarkan usia

Responden berusia 17-30 tahun sebanyak 37 orang atau 37,76% dari total sampel, berusia 30-50 tahun sebanyak 51 orang atau 52,04%, dan berusia di atas 50 tahun sebanyak 10 orang atau 10,20%, dengan responden terbanyak pada rentang usia 31-50 tahun.

4.2. Hasil Uji Statistik

4.2.1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu instrumen penelitian. Kuesioner penelitian dikatakan valid apabila item pertanyaan pada suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur dari kuesioner tersebut yang menjadi tujuan dari penelitian. Pengujian untuk menentukan valid atau tidaknya item kuesioner menggunakan nilai r_{tabel} . Dalam penelitian ini r_{tabel} untuk jumlah data atau responden sebanyak 98 orang dengan tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 0,202. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016).

Pengujian validitas untuk variabel independent Akuntabilitas yaitu dilakukan dengan menggunakan *product moment*. Adapun hasil pengujian untuk variabel Akuntabilitas yang berjumlah 5 item pertanyaan, semua item pertanyaan mempunyai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} . Dengan kata lain, setiap item pertanyaan pada instrumen penelitian ini dinyatakan valid. Pengujian validitas untuk variabel independent Transparansi yaitu dilakukan dengan menggunakan *product moment*. Adapun hasil pengujian untuk variabel transparansi yang berjumlah 5 item pertanyaan, semua item pertanyaan mempunyai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} . Dengan kata lain, setiap item pertanyaan pada instrumen penelitian ini dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas terhadap setiap item pada instrumen penelitian untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat yang berjumlah 10 item pertanyaan, semua item pertanyaan mempunyai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} . Dengan kata lain, setiap item pertanyaan pada instrumen penelitian ini dinyatakan valid.

4.2.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan syarat kedua untuk memastikan instrumen penelitian apakah bisa digunakan atau tidak. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner apakah memiliki konsistensi atau tidak, sehingga item pertanyaan pada kuesioner bisa diandalkan untuk mendapat respon dari responden. Suatu data dikatakan reliabel apabila mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6 (Sujarweni, 2014). Uji reliabilitas dilakukan untuk item pertanyaan yang sudah dinyatakan valid.

Hasil pengujian pada variabel Akuntabilitas mengenai reliabilitas kuesionernya, maka didapat angka *Cronbach's Alpha* sebesar 0,661. Angka ini mengindikasikan bahwa pertanyaan pada variabel Akuntabilitas dinilai reliabel untuk digunakan. Hasil pengujian pada variabel Transparansi mengenai reliabilitas kuesionernya, maka didapat angka *Cronbach's Alpha* sebesar 0,614. Angka ini mengindikasikan bahwa pertanyaan pada variabel Transparansi dinilai reliabel untuk digunakan. Hasil pengujian pada variabel Kesejahteraan Masyarakat mengenai reliabilitas kuesionernya, maka didapat angka *Cronbach's Alpha* sebesar 0,618. Angka ini mengindikasikan bahwa pertanyaan pada variabel Kesejahteraan Masyarakat dinilai reliabel untuk digunakan.

4.2.3. Uji Asumsi Klasik

1) Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t mengasumsikan bahwa nilai residual tersebut harus berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2016).

Tabel 1. Uji Normalitas

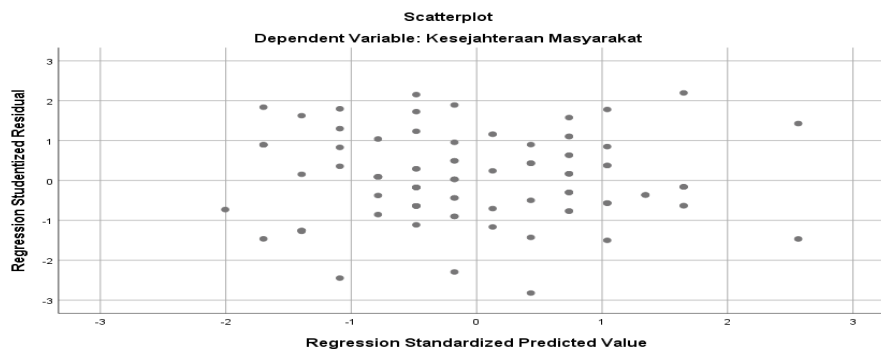
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.14189233
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.059
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2022)

Tabel 1 uji normalitas diatas, maka dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal. karena pada uji Kolmogorov-Smirnov data sudah menunjukkan normal, karena diketahui nilainya 0,200 lebih besar dari 0,05.

2) Uji hesterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variansnya tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik haruslah yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan yaitu melihat grafik *scatterplot* (Ghozali, 2016).



Sumber: Data diolah

Gambar 1. Grafik Scatterplot

Grafik pada gambar 1 grafik scatterplot diatas, dapat dilihat bahwa titik-titiknya menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.

3) Uji linearitas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji ini maka akan diperoleh informasi apakah model empiris yang digunakan sebaiknya linear, kuadrat, atau kubik. Dalam penelitian ini digunakan *test of linearity* pada program SPSS 25. Suatu model dikatakan linear apabila nilai F tabel > F hitung. Berikut ini hasilnya:

a. Kesejahteraan Masyarakat * Akuntabilitas

Hasil uji linear variabel akuntabilitas terhadap kesejahteraan masyarakat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil uji linear Kesejahteraan Masyarakat * Akuntabilitas

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kesejahteraan Masyarakat * Akuntabilitas	Between Groups	(Combined) Linearity	261.581	8	32.698	5.601	.000
		Deviation from Linearity	231.594	1	231.594	39.67	.000
			29.987	7	4.284	.734	.644
Within Groups			519.522	89	5.837		
Total			781.102	97			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2021)

Tabel 2, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 0,734 dan F tabel diketahui sebesar 3,09. Maka dapat disimpulkan model yang digunakan sudah linear karena F tabel 3,09 > dari F hitung 0,734.

b. Kesejahteraan Masyarakat * Transparansi

Hasil uji linear variabel transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil uji linier Kesejahteraan Masyarakat * Transparansi

			Sum of		Mean		
			Squares	Df	Square	F	Sig.
Kesejahteraan Masyarakat * Transparansi	Between	(Combined)	306.604	10	30.660	5.622	.000
	Groups	Linearity	212.182	1	212.182	38.90	.000
		Deviation from Linearity	94.422	9	10.491	1.924	.059
	Within Groups		474.498	87	5.454		
Total			781.102	97			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2021)

Tabel 3, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 1,924 dan F tabel diketahui sebesar 3,09. Maka dapat disimpulkan model yang digunakan sudah linear karena F tabel 3,09 > dari F hitung 1,924.

4) Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau variabel independen secara individual untuk menerangkan variasi atau perubahan dalam variabel terikat atau dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan membandingkan antara nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka setiap variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan sebaliknya, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka setiap variabel independen yang diteliti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (uji t) Akuntabilitas

Model		Unstandardized		Standardized		T	Sig.
		Coefficients		Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	20.313	1.894			10.723	.000
	Akuntabilitas	.734	.115	.545		6.361	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2021)

Nilai t_{tabel} untuk tingkat signifikansi 5% dengan responden 98 orang yaitu sebesar 1,985. Dari perhitungan tabel 4 maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat karena $t_{hitung} 6,361 > t_{tabel} 1,985$.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (uji t) Transparansi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.562	1.971		10.430	.000
	Transparansi	.765	.128	.521	5.984	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2021)

Nilai t_{tabel} untuk tingkat signifikansi 5% dengan responden 98 orang yaitu sebesar 1,985. Dari perhitungan tabel 5 maka dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat karena $t_{hitung} 5,984 > t_{tabel} 1,985$.

5) Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, R^2 digunakan untuk melihat seberapa besar variabel Kesejahteraan Masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel Akuntabilitas dan variabel Transparansi.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.656 ^a	.430	.418	2.164

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2021)

Nilai R^2 pada tabel 6 diatas sebesar 0,430 menandakan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMNag menjelaskan pengaruh terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat Nagari sebesar 43% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

6) Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda (Akuntabilitas)

Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.313	1.894		10.723	.000
	Akuntabilitas	.734	.115	.545	6.361	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2021)

Tabel 7 di atas, menunjukkan persamaan regresi menggunakan *Unstandardized Coefficients* di mana koefisien konstanta sebesar 20,313, untuk variabel Akuntabilitas mempunyai koefisien sebesar 0,734.

Tabel 8. Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda (Transparansi)

Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.562	1.971		10.430	.000
	Transparansi	.765	.128	.521	5.984	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2021)

Tabel 8 di atas, menunjukkan persamaan regresi menggunakan *Unstandardized Coefficients* di mana koefisien konstanta sebesar 20,562, untuk variabel transparansi mempunyai koefisien sebesar 0,765.

Persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan bahwa:

- a. Nilai konstanta variabel akuntabilitas sebesar 20,313 menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas memiliki nilai 0, maka nilai variabel terikatnya dalam hal ini Kesejahteraan Masyarakat sebesar 20,313. Variabel akuntabilitas (X1) dalam pengelolaan keuangan BUMNag memiliki nilai koefisien 0,734 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan akuntabilitas (X1) dalam pengelolaan keuangan BUMNag sebesar satu satuan, maka variabel Kesejahteraan Masyarakat Nagari akan naik sebesar 0,734 dengan asumsi variabel lain yang tidak diteliti adalah tetap.
- b. Nilai konstanta variabel transparansi sebesar 20,562 menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas memiliki nilai 0, maka nilai variabel terikatnya dalam hal ini Kesejahteraan Masyarakat sebesar 20,562. Variabel Transparansi (X2) dalam pengelolaan keuangan BUMNag memiliki nilai koefisien 0,765 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan transparansi (X2) dalam pengelolaan keuangan BUMNag sebesar satu satuan, maka variabel

Kesejahteraan Masyarakat Nagari akan naik sebesar 0,765 dengan asumsi variabel lain yang tidak diteliti adalah tetap.

4.3. Pembahasan

Nagari Koto Padang sampai dengan tahun 2019 berjumlah penduduk sebesar 6040 jiwa, terdiri dari 3154 laki-laki dan 2886 perempuan. (Data penduduk tahun 2019 Nagari Koto Padang. Penduduk Nagari Koto Padang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh dan wiraswasta karena Nagari ini memiliki wilayah perkebunan, persawahan yang cukup luas dan tempat lalu lalang produktifitas pertanian dari berbagai wilayah. Jadi, kesejahteraan penduduk Nagari Koto Padang masih ditopang oleh hasil alam.

Beragam permasalahan dalam pengelolaan keuangan BUMNag yaitu waktu perencanaan yang sempit, kurang maksimalnya fungsi lembaga Nagari dan perangkat BUMNag, kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan Keuangan BUMNag sehingga program program BUMNag berjalan kurang optimal. Serta partisipasi masyarakat yang rendah karena didominasi oleh perangkat Nagari. Berdasarkan permasalahan tersebut, mengutip hasil penelitian oleh Sugista (2017) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan Desa. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan BUMNag yang baik dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Nagari. Penelitian oleh Muljo dkk (2014) mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran juga menyatakan bahwa akuntabilitas berhubungan positif dengan pengelolaan anggaran, transparansi juga berhubungan positif dengan pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas dan transparansi secara bersama sama mempunyai hubungan yang positif terhadap pengelolaan anggaran.

Perhitungan uji parsial (uji t) variabel akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMNag terhadap kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,361 > t_{tabel} 1,985$ serta tingkat signifikansi $0,00 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Koefisien variabel akuntabilitas sebesar 0,734 juga menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMNag terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat positif. Artinya, semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMNag, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat Nagari.

Perhitungan uji parsial (uji t) variabel transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,984 > t_{tabel} 1,985$ serta tingkat signifikansi $0,00 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Koefisien variabel transparansi sebesar 0,765 juga menunjukkan bahwa pengaruh transparansi pengelolaan keuangan BUMNag terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat positif. Artinya, semakin tinggi transparansi pengelolaan keuangan BUMNag, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat Nagari.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Sugista (2017) serta penelitian oleh Muljo dkk (2014) dengan perspektif ekonomi seperti kemiskinan, pendapatan, dan kelompok usaha, bahwa

ada pengaruh signifikan dan positif antara akuntabilitas dan transparansi dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, indikator keadilan sosial, ekonomi, dan demokrasi dapat menjelaskan bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMNag mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Nagari. Sehingga hasil penelitian ini menolak hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra T.Z. (2019) yaitu, bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Dan Belanja Desa karena ada faktor - faktor yang menyebabkan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Dan Belanja Desa tersebut.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMNag berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hipotesis yang diajukan diterima, ini berarti semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMNag maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat Nagari.
2. Serta transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMNag berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, hipotesis yang diajukan dapat diterima, ini berarti semakin tinggi transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMNag, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat Nagari.

Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain dan menambah jumlah sampel serta objek penelitian agar semakin reliabel. Selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan meneliti pada tempat lain sesuai dengan keadaan permasalahan pengelolaan keuangan dan program BUMNag / BUMDes yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dengan pertimbangan berbagai indikator lainnya selain keadilan sosial, ekonomi, serta demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, N. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia publishing.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya. 2020. Kecamatan Koto Baru Dalam Angka 2020. ISBN 978-602-5957-43-7.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Penerbit LAN.
- Mahmudi, 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik* :

- Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2, No. 1 Mei 2006.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mesta, H.A., Zulvia, Y., dan Sembada 2018, Penerbit PKN STAN Politeknik Keuangan Negara.
- Muljo, H. H., Kurniawati, H., & Pahala, P. 2014. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran. *Binus Business Review*, 5(2), 537-550.
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Bandung: UNPAD press.
- Ni'matul, H. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press. Hlm 36.
- Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Nagari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putra, T.Z. 2019. Skripsi. *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)* . (studi kasus pada alokasi dana desa tahun anggaran 2018 di Desa Sukatani, Sukadamai, dan Muara Sugih di Kecamatan Tanjung Lago Kab. Banyuasin). Palembang.
- Sekaran,U dan Bougie, R. 2013. *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soetomo, 2014, *Kesejahteraan dan upaya Mewujudkan dalam Perspektif masyarakat lokal*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugista, R.A. 2017. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa*. Lampung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gavamedia .
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.